

TINJAUAN TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DALAM MENINGKATKAN POTENSI PARIWISATA PADA MASA PANDEMI

Muhammad Ardhi Razaq Abqa

Universitas Tidar, Indonesia, muhammadardhi@untidar.ac.id

Arief Nur Huda

Universitas Tidar, Indonesia, ariefnurhuda2018@gmail.com

Nur Rahmawati

Universitas Tidar, Indonesia, nurrahmawati1806@gmail.com

Abstract

The spread of the Covid-19 virus in Indonesia has an impact on various sectors of life, especially the tourism sector. The Magelang Regency Government in this case has issued various policies based on the central government's policies in the context of handling Covid-19 in Magelang Regency and at the same time as policies that support the rise of the tourism sector. The purpose of this study was to determine the policies of the Magelang district government in increasing tourism potential during the pandemic. The research method uses the library method through a qualitative approach with reading materials in the form of scientific journals, papers and official websites related to the titles and variables that are the subject of writing. The Magelang Regency Government has prepared the feasibility of tourist destinations so that they do not become clusters of the spread of Covid-19. Tourist destinations that are allowed to open are only tourism that has received a CHSE certificate from the Ministry of Tourism and Creative Economy. The Magelang Regency Government also held mass Covid-19 vaccinations at tourist destinations. In addition, the Head of the Magelang Regency Youth and Sports Tourism Office collaborated with the Central Java Province Communication and Information Office in order to strengthen internet signal at natural tourist sites.

Keywords: *Government Policy, Tourism, Pandemic*

Abstrak

Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia telah menimbulkan dampak berbagai sektor kehidupan, khususnya sector pariwisata. Pemerintah Kabupaten Magelang dalam hal ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berlandaskan atas kebijakan pemerintah pusat dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Magelang sekaligus kebijakan yang mendukung bangkitnya sector pariwisata. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan pemerintah kabupaten Magelang dalam meningkatkan potensi pariwisata pada masa pandemi. Metode Penelitian menggunakan metode kepustakaan melalui pendekatan kualitatif dengan bahan bacaan berupa jurnal ilmiah, makalah maupun *website* resmi yang berkaitan dengan judul dan variabel yang menjadi pokok penulisan. Pemerintah Kabupaten Magelang telah mempersiapkan kelayakan destinasi wisata agar tidak menjadi klaster penyebaran Covid-19. Destinasi wisata yang diperbolehkan untuk dibuka hanya pariwisata yang telah menerima sertifikat CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pemerintah Kabupaten Magelang juga menyelenggarakan Vaksinasi Covid-19 massal di

tempat wisata. Selain itu, Kepala Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dalam rangka melakukan penguatan sinyal internet di lokasi wisata alam.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pariwisata, Pandemi

PENDAHULUAN

Di awal tahun 2020 ini hampir seluruh negara terdampak oleh virus *Covid-19* termasuk negara Indonesia. Pada bulan Desember 2019 ditemukan virus *Covid-19* di Kota Wuhan untuk pertama kalinya. Akibat dari virus ini berbagai sektor seperti sosial, ekonomi, dan pendidikan mengalami penurunan yang sangat drastis. Dalam menangani virus *Covid-19* di Indonesia, diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdesentralisasikan sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah, provinsi. Serta dibagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota yang mana mempunyai pemerintahan sendiri, yang telah diatur oleh Undang-Undang. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sering diperbincangkan oleh berbagai kalangan karena dalam menjalankan tugasnya masih menimbulkan tarik menarik antar kepentingan (*spanning of interest*). Dalam negara kesatuan Pemerintah Pusat selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan.¹ Diperlukan koordinasi

antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk menekan virus *Covid-19*.

Aubrecht et al. (2020) dalam tulisannya berjudul *Centralized and Decentralized Responses to COVID-19 in Federal Systems: US and EU Comparisons* bahwa perlu adanya kombinasi peran yang cermat (*smart mix*) antara sentralisasi dan desentralisasi. Kebijakan-kebijakan dalam menangani kasus *Covid-19* ada yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Pusat, tetapi ada juga yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam implementasi kebijakan penekanan kasus *Covid-19* di Indonesia ditemukan masih banyak kendala. Hal ini dikarenakan adanya kontradiksi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, terjadi perbedaan dalam praktiknya antara pusat dengan daerah.

Dampak dari adanya virus *Covid-19* ini sudah menimbulkan dampak dalam berbagai sektor kehidupan. Pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menangani pandemi *Covid-19* ini. Salah satu kebijakannya yaitu penerapan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Namun dalam implementasinya, kebijakan ini justru menimbulkan dampak yang sangat beragam dalam sektor kehidupan. Seperti dalam hal ekonomi, hampir seluruh masyarakat mengalami penurunan omzet yang bahkan tak sedikit pengusaha yang terpaksa harus menutup usahanya. Kemudian dalam bidang pariwisata,

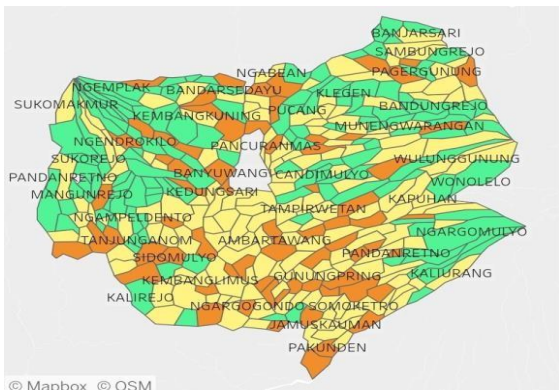
¹ Septi Nur Wijayanti, "Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2017): 186–199.

banyak pariwisata yang terpaksa tutup karena adanya penerapan PPKM.

Selain itu, pemerintah Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya untuk mensosialisasikan vaksin kepada masyarakat. Pemerintah melakukan ini dengan harapan agar masyarakat tidak mudah tertular virus Covid-19 karena daya tahan tubuhnya yang kuat. Menteri Kesehatan Republik Indonesia menghimbau Pemerintah Daerah supaya tidak menyimpan stok vaksin Covid-19 karena pengirimannya akan diatur oleh pemerintah pusat agar mempercepat proses vaksinasi.

Kebijakan pemerintah pusat akan berjalan dengan maksimal apabila didukung oleh Pemerintah Daerah terutama dalam penanganan Covid-19 ini. Hal ini sebagai wujud negara kesatuan yang terdesentralisasikan sehingga diperlukan relasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

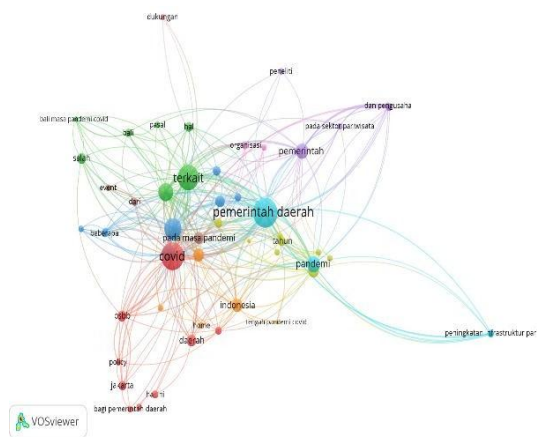
Salah satu kabupaten di Indonesia yang pernah mengalami pelonjakan kasus Covid-19 yakni Kabupaten Magelang. Pemerintah Kabupaten telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang berlandaskan atas kebijakan pemerintah pusat dalam rangka penanganan Covid-19 di Kabupaten Magelang.



Gambar 1. Peta Daerah Rawan COVID-19 Kab Magelang Minggu ke – 86. Sumber data : corona.jatengprov.go.id.

Dalam upaya mendukung program vaksinasi yang dilakukan pemerintah pusat, maka Pemerintah Kabupaten Magelang bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti PMI, Kodim 0705, dan Polres Kota Magelang. Vaksinasi ini dilakukan di beberapa tempat seperti puskesmas, rumah sakit, dan tempat wisata yakni Kyai Langgeng dan Candi Borobudur. Selain itu, Pemerintah Kabupaten dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 juga melakukan penguatan sinyal internet di berbagai tempat wisata alam di Kabupaten Magelang. Tujuannya guna mempermudah dalam proses skrining, tracking, dan tracing. Namun, prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama mengingat kondisi geografis Kabupaten Magelang itu sendiri.

Upaya Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penanganan Covid-19 merupakan bentuk sinergi untuk mendukung program pemerintah dalam menekan Covid-19 di Indonesia. Relasi ini sangat dibutuhkan pada masa pandemi saat ini guna memperbaiki berbagai sektor kehidupan masyarakat.



Gambar 2 Bibliografi tema kebijakan

Pemda terkait Pariwisata pada masa Pandemi. Pada Scholar (diakses pada tanggal 5 Oktober 2021).

Berdasarkan hal tersebut penulis akan menganalisis mengenai kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam penanganan virus *Covid-19* dalam sektor pariwisata yang meliputi program vaksinasi dan penguatan sinyal pada destinasi wisata alam.

Rumusan Masalah

Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata pada Masa Pandemi ?

Tujuan Penelitian

Mengetahui Kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam Meningkatkan Potensi Pariwisata pada Masa Pandemi.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menerapkan metode penelitian kepustakaan melalui pendekatan kualitatif. Metode kepustakaan dalam hal ini, penulis melakukan pengumpulan data berdasar pada sumber- sumber yang terdiri atas dokumen- dokumen tertulis dalam bentuk jurnal ilmiah, buku, artikel resmi dan lain sebagainya. Penelitian kepustakaan melalui pendekatan kualitatif ini berhadapan langsung dengan data dalam bentuk teks atau tulisan, bukan berupa angka atau studi lapangan.

Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis melakukan identifikasi mengacu pada jurnal ilmiah, makalah maupun *website* resmi yang memiliki

keterkaitan dengan judul dan variabel yang menjadi pokok penulisan. Kemudian data-data didapat melalui sumber primer maupun sekunder

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menghadapi adanya penyebaran *Covid-19* di Indonesia, maka pemerintah membentuk Tim Gerak Cepat yang bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang memasuki wilayah Indonesia. Selain itu, pemerintah juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk membuat berbagai langkah dalam mencegah penularan *Covid-19* yakni adanya *thermal alert card* pada bandara-bandara di Indonesia. Kemudian juga menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada dinas kesehatan masing-masing daerah untuk melakukan mempersiapkan rumah sakit rujukan dalam menghadapi adanya penyebaran *Covid-19*.

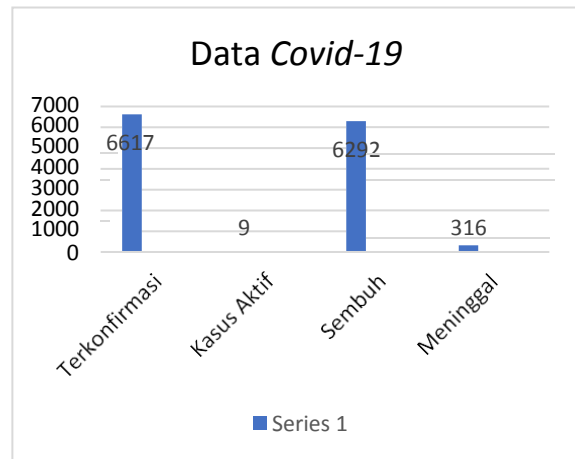
Pemerintah Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* sehingga penanganan *Covid-19* di Indonesia berada di bawah Gugus Tugas yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Berdasarkan Keppres tersebut, maka dalam penanganan *Covid-19* berada pada Pemerintah Pusat. Sedangkan Pemerintah Daerah hanya membentuk dan memimpin Gugus Tugas pada daerahnya masing-masing sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Daerah.

Pandemi *Covid-19* telah menyebar luas ke seluruh dunia, termasuk Indonesia

itu sendiri. Pandemi ini telah telah menimbulkan dampak serius terhadap berbagai sektor kehidupan, terutama sektor pariwisata. Sektor pariwisata mempunyai peranan yang sangat signifikan bagi peningkatan perekonomian negara. Namun, dengan adanya pelonjakan *positive rate* di Indonesia, maka Pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Tujuan dari kebijakan ini yakni mencegah dan memutus penularan *Covid-19* di Indonesia.

Dampak dari penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yakni adanya penutupan berbagai destinasi wisata. Sektor pariwisata merupakan sektor yang paling berdampak dari adanya *Covid-19*. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembatalan beberapa festival di lokasi wisata. Festival ini sebenarnya dapat menarik wisatawan untuk mengunjungi, tetapi karena pelonjakan kasus positif *Covid-19* terpaksa dibatalkan guna menekan penyebaran *Covid-19* sehingga berdampak juga terhadap sektor perekonomian.

Pemerintah telah memberlakukan berbagai kebijakan sehingga dapat menekan penularan *Covid-19*. Adanya penurunan kasus positif di *Covid-19*, maka Pemerintah pusat memperbolehkan Pemerintah daerah untuk membuka destinasi wisata dengan penerapan protokol kesehatan yang dianjurkan. Oleh karena itu, untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah turut serta andil dalam upaya mencegah penularan *Covid-19*. Hal ini merupakan wujud dari penerapan asas desentralisasi di Indonesia.



Grafik 1 Data Covid-19 di Magelang per tanggal 7 Oktober 2021.

Dalam grafik tersebut, berisikan data *Covid-19* di Magelang bahwa telah terkonfirmasi masyarakat yang terkena selama ini 6627 orang. Untuk yang sudah sembuh 6292 orang, yang meninggal 316 orang, dan yang masih mengalami terkena *Covid-19* per 7 Oktober 9 orang.²

Pariwisata di Kabupaten Magelang

Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yakni Kabupaten Magelang mempunyai banyak destinasi wisata, baik alam maupun non-alam. Akan tetapi, Kabupaten Magelang mayoritas destinasi wisatanya berupa wisata alam. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Magelang itu sendiri. Antusiasme wisatawan berkunjung ke destinasi wisata di Kabupaten Magelang sangat tinggi.

Namun, adanya pelonjakan kasus positif *Covid-19* di Kabupaten Magelang, maka Pemerintah Kabupaten Magelang terpaksa menutup seluruh destinasi wisata yang ada di Kabupaten Magelang. Terlebih Kabupaten Magelang masuk ke dalam zona merah. Penutupan ini

² “Data Dan Informasi Terkini Covid-19 Kota Magelang,” accessed October 9, 2021, <http://covid19.magelangkota.go.id/>.

dilakukan sesuai dengan instruksi Pemerintah Pusat dalam rangka menekan penyebaran *Covid-19* dengan menerbitkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Selama penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) memaksa Pemerintah Kabupaten Magelang untuk menutup seluruh sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Magelang. Hal ini berimbas terhadap perekonomian para pelaku sektor pariwisata. Karena beberapa acara penting yang biasanya dapat mendatangkan banyak pengunjung seperti *Borobudur Marathon* terpaksa ditiadakan sehingga berimbas pada sektor perekonomian.

Dengan adanya penurunan kasus positif di *Covid-19* di Indonesia, maka Pemerintah pusat mengizinkan Pemerintah Daerah untuk membuka kembali destinasi wisata dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hal ini menjadi kesempatan pemerintah daerah dalam memperbaiki perekonomian masyarakatnya. Salah satu kabupaten di Indonesia yang memulai membuka destinasi wisata yakni Pemerintah Kabupaten Magelang. Sebelum membukanya, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mempersiapkan kelayakan destinasi wisata agar tidak menjadi klaster penyebaran *Covid-19*. Namun, destinasi wisata yang diperbolehkan untuk dibuka hanya Candi Borobudur. Destinasi wisata yang diperbolehkan untuk dibuka hanya pariwisata yang telah menerima sertifikat CHSE dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penyelenggaraan Vaksinasi Masal pada

Destinasi Wisata di Kabupaten Magelang

Dalam penyelenggaraan Vaksinasi di Kabupaten Magelang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan Vaksinasi *Covid-19* massal di tempat wisata. Seperti di kawasan Candi Borobudur. Balkondes Menoreh Tanjungsari dan Desa Wisata Wanurejo. Dalam Vaksinasi massal, pemerintah menargetkan paling sedikit 10 ribu orang. Targetnya seperti pelaku dan stakeholder pariwisata agar mereka dapat terlindungi dari Virus *Covid-19*. Hal ini senada dengan yang diamanahkan dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang menyebutkan bahwa setiap wisatawan berhak memperoleh, Meliputi pelayanan kepariwisataan sesuai dengan mutu pelayanan yang telah ditetapkan tanpa diskriminasi, serta hak atas kenyamanan, keamanan dan jaminan perlindungan hukum dan pelayanan kesehatan. Alasan pemerintah mempercepat Vaksinasi massal *Covid-19* di daerah Kabupaten Megelang Karena dalam waktu dekat akan ada *Tour de Borobudur* (TDB), *event* bersepeda skala nasional, dan *Borobudur Marathon event international marathon*. Jadi, sebelum kedua event itu terjadi, vaksinasi harus dipercepat. Harapannya dengan adanya vaksinasi di destinasi wisata tersebut masyarakat di daerah Kabupaten Magelang dapat terlindungi. Karena dilihat dari pesertanya dan kegiatan ini di tingkat nasional dan internasional juga akan sering bersangkutan dengan masyarakat kawasan Borobudur.³ Selain

³ Dorong Pemulihan Wisata, Jateng Gelar Vaksinasi Di Borobudur | Republika Online,” accessed October 8, 2021, <https://www.republika>.

itu, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah Yulianto Prabowo menyatakan bahwa vaksinasi pada lokasi wisata ini diadakan demi mendorong peningkatan vaksinasi di wilayah yang masih rendah capaian vaksin *Covid-19*, mengingat bahwa di Kabupaten Magelang vaksinasi *Covid-19* baru menyentuh angka 16,28 persen. Sedangkan, di seluruh Jawa Tengah 27,4 persen atau 7.855.000 jiwa telah melakukan vaksinasi.⁴ Vaksinasi pada lokasi wisata ini kedepannya diharapkan dapat menjadim salah satu faktor pendorong pembukaan kembali aktivitas wisata di Borobudur.

Tidak hanya di Borobudur, tempat wisata yang menyelenggarakan Vaksinasi juga terdapat di Taman Kyai Langgeng, pemerintah menargetkan untuk 1000 orang yang terdapat di 8 kelurahan, seperti Kelurahan Tidar Utara, Tidar Selatan, Rejowinangun Selatan, Margersari, Kelurahan Kemirirejo, Cacaban, Jurangombo Utara dan Jurangombo Selatan.

Alasan melakukan Vaksinasi di tempat wisata ini berbeda dengan alasan Vaksinasi di kawasan Borobudur, tujuannya agar untuk memberikan suasana berbeda dengan tempat vaksin biasanya karena selama ini vaksin di rumah sakit maupun puskesmas. Hal ini telah di katakan oleh Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz.⁵

co.id/berita/r0193p370/doroning-pemulihan-wisata-jateng-gelar-vaksinasi-di-borobudur.

⁴ Ini Wilayah Yang Akan Disasar Bus Vaksin Jateng - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," accessed October 15, 2021,

⁵ Vaksinasi Covid-19 Massal Kota Magelang, Salah Satunya Di Taman Kyai Langgeng –Humas," accessed October 9,

Penguatan Sinyal Pariwisata oleh Pemerintah Kabupaten Magelang

Destinasi pariwisata di Kabupaten Magelang akan mulai dibuka kembali setelah adanya instruksi dari Pemerintah Pusat yang memperbolehkan untuk membuka destinasi wisata. Pemerintah Kabupaten telah mempersiapkan berbagai kebijakan sebelum membuka kembali destinasi wisata. Salah satu kebijakannya berupa penguatan sinyal internet. Hal ini dikarenakan wisatawan ketika berkunjung ke destinasi wisata diwajibkan untuk melakukan *scan barcode* melalui aplikasi Peduli Lindungi. Tujuannya untuk mempermudah Pemerintah dalam melakukan skrining, *tracking*, dan *tracing* sebagai bentuk pengoptimalan kebijakan mengenai pengendalian penularan *Covid-19*. wisata di kawasan lereng Gunung Merapi, Merbabu, dan Sumbing merupakan daerah yang sulit sinyal. Dalam melakukan penguatan sinyal, maka diperlukan waktu yang cukup lama sehingga wisatawan cukup menunjukkan kartu vaksinasi.

Destinasi wisata di Kabupaten Magelang mayoritas berada di ruang terbuka yakni daerah pegunungan sehingga sinyal internet terhambat. Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang melakukan kerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah guna melakukan penguatan sinyal internet di lokasi wisata alam. Dinas Komunikasi dan Informatika telah merancang Rencana Strategis Perubahan 2018-2023 dan Rencana Kerja 2022 yang kemudian Dinas

2021, <https://humas.magelangkota.go.id/vaksinasi-covid-19-massal-kota-magelang-salah-satunya-di-taman-kyai-langgeng/>.

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang turut menyesuaikan indikator baru yang diatur dalam Diskominfo Provinsi Jawa Tengah tersebut. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu tujuan arah kebijakan Diskominfo ini adalah untuk mendorong digitalisasi tata kelola pemerintahan Jawa Tengah. Strategi yang diambil dalam hal ini ialah melalui upaya peningkatan ketersediaan infrastruktur TIK dan peningkatan aplikasi yang terintegrasi. Implementasinya pada wilayah Kabupaten Magelang ialah salah satunya berkaitan dengan penguatan sinyal pada daerah wisata tertentu yang masih kurang akses jaringan internet, karena berkaitan pula dengan aplikasi terintegrasi peduli lindungi yang saat ini sebagai syarat memasuki kawasan destinasi wisata.

Adapun beberapa destinasi wisata alam di Kabupaten Magelang di antaranya Mangli *Sky View* Kecamatan Kaliangkrik, Air Terjun Kedung Kayang, serta tempat



Gambar 1. Wisata Alam Air Terjun Kedung Kayang. Sumber Kompas.com.

Salah satu wisata alam yang ada di Kabupaten Magelang yakni wisata Air Terjun Kedung Kayang yang memerlukan adanya penguat sinyal. Banyak para wisatawan, baik domestik

ataupun mancanegara yang berkunjung ke sini. Jadi, demi kenyamanan para wisatawan memang membutuhkan adanya penguat sinyal di daerah tersebut.

Penguatan sinyal internet pada destinasi wisata alam di Kabupaten Magelang merupakan wujud dukungan pemerintah daerah terhadap program pemerintah pusat guna mencegah dan memutus penularan *Covid-19* di Indonesia. Ini sebagai upaya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di kala masa pandemi. Penguatan sinyal sebagai salah satu persiapan untuk membuka kembali wisata di Kabupaten Magelang agar kemudian layak untuk dikunjungi para wisatawan. Persiapan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), diantaranya *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE)*.

KESIMPULAN

Dalam menekan penularan *Covid-19* di Indonesia, maka Pemerintah Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*. Keppres tersebut menjelaskan bahwa penanganan *Covid-19* di Indonesia berada di bawah Gugus Tugas Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sedangkan Pemerintah Daerah berperan untuk membentuk dan memimpin Gugus Tugas pada daerahnya masing-masing berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tanggal 29 Maret 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Daerah. Pandemi ini telah menimbulkan dampak serius terhadap berbagai sektor

kehidupan, terutama sektor pariwisata. Sektor pariwisata mempunyai peranan yang sangat signifikan bagi peningkatan perekonomian negara. Namun, dengan adanya pelonjakan kasus positif *Covid-19* di Indonesia, maka Pemerintah Indonesia menerbitkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Dampak dari diberlakukannya kebijakan PPKM yakni adanya penutupan berbagai destinasi wisata. Setelah adanya penurunan kasus positif di *Covid-19* di Indonesia, maka Pemerintah Pusat mengizinkan Pemerintah Daerah untuk membuka kembali destinasi wisata dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pemerintah Kabupaten Magelang telah mempersiapkan kelayakan destinasi wisata agar tidak menjadi kluster penyebaran *Covid-19*. Pemerintah Kabupaten Magelang juga menyelenggarakan Vaksinasi *Covid-19* massal di tempat wisata dengan target pelaku dan *stakeholder* pariwisata agar mereka dapat terlindungi dari Virus *Covid-19* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2018. Kemudian Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Magelang berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah guna melakukan penguatan sinyal internet di lokasi wisata alam.

Berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang diharapkan dapat menjadi indikator dalam pemulihan perekonomian masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan potensi pariwisata pada masa pandemi di Kabupaten Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggarini, Desy Tri. "Upaya Pemulihan Industri Pariwisata Dalam Situasi Pandemi Covid -19." *Jurnal Pariwisata* 8, no. 1 (2021): 22–31.
- Kab, Renstra Diskominfo. "Renstra Diskominfo Kab. Magelang 2019 – 2024 |I - 1" (2019).
- Keislaman, Jurnal, and Kebudayaan Volume. "Ma'mun Nawawi: Optimalisasi Sektor Pariwisata..." 22, no. 1 (2021): 41–56.
- Nur Wijayanti, Septi. "Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2017): 186–199.
- Tulus Santoso. "Jurnal Ilmu Administrasi The Relationship Between Center and Local Government in Dealing with COVID- " 17, no. 2 (2020): 161–177.
- Sugihamretha, I Dewa Gde. "Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor Pariwisata." *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4, no. 2 (2020): 191–206.
- "Berita Magelang - Pandemi Covid-19 Berdampak Pada Multi Sektor." Accessed October 8, 2021. <http://beritamagelang.id/pandemi-covid-19-berdampak-pada-multi-sektor>.
- "Data Dan Informasi Terkini Covid-19 Kota Magelang." Accessed October 9, 2021. <http://covid19.magelangkota.go.id/>.

“Dorong Pemulihan Wisata, Jateng Gelar Vaksinasi Di Borobudur | Republika Online.” Accessed October 8, 2021.
<https://www.republika.co.id/berita/r0193p370/dorong-pemulihan-wisata-jateng-gelar-vaksinasi-di-borobudur>.

“Ini Wilayah Yang Akan Disasar Bus Vaksin Jateng - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.” Accessed October 15, 2021.
<https://jatengprov.go.id/publik/in-i-wilayah-yang-akan-disasar-bus-vaksin-jateng/>.

“Pemkab Magelang Siapkan Tempat Wisata, Sinyal Internet Diperkuat.” Accessed October 8, 2021.
<https://travel.kompas.com/read/2021/09/19/095025127/pemkab-magelang-siapkan-tempat-wisata-sinyal-internet-diperkuat>.

“Vaksinasi Covid-19 Massal Kota Magelang, Salah Satunya Di Taman Kyai Langgeng – Humas.” Accessed October 9, 2021.
<https://humas.magelangkota.go.id/vaksinasi-covid-19-massal-kota-magelang-salah-satunya-di-taman-kyai-langgeng/>.